



Accepted: Oktober 2025	Revised: November 2025	Published: Desember 2025
----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

Sekolah Kebijakan: Model Pelatihan Partisipatif Penyusunan Regulasi Responsif Gender Di Satuan Pendidikan Menengah

**Sutri Destemi Elsi¹, Cholillah Suci Pratiwi², Revi Jeane Putri³,
M. Wira Anshori⁴, Zakly Hanafi Ahmad⁵, Hatta Abdi Muhammad⁶**

E-mail: elsi@unja.ac.id¹, cholillahsucipratiwi@unja.ac.id²,
reviJeaneputri@unja.ac.id³, wiraanshori@unja.ac.id⁴, zaklyhanafi@unja.ac.id⁵,
hatta.abdi@unja.ac.id⁶

Universitas Jambi, Indonesia

Abstract

This community service program, entitled *Policy School: Formulating Gender-Responsive Policies in SMAN 11 Kota Jambi*, was conducted as part of the Tri Dharma of Higher Education to address the limited institutional capacity of secondary schools in integrating gender perspectives into internal policies. The program employed a participatory approach based on a *Participatory Action Approach*, involving teachers, school staff, and students in a structured process of problem identification, capacity building, and policy formulation. Data were generated through participatory observation, focus group discussions, and reflective evaluation of participants' understanding before and after the intervention. The results indicate a significant improvement in participants' comprehension of gender-responsive policy principles and their ability to identify gender bias in school regulations and practices. A key outcome of the program was the formulation of a draft gender-responsive school policy guideline, reflecting the school's contextual needs. Overall, the program demonstrates that participatory policy learning can effectively strengthen institutional capacity and support the implementation of gender mainstreaming at the secondary education level.

Keywords: *Gender-Responsive Policy; Participatory Training; School Governance; Gender Mainstreaming.*

Abstrak

Program pengabdian kepada masyarakat berjudul *Sekolah Kebijakan: Penyusunan Kebijakan Responsif Gender di Lingkungan SMAN 11 Kota Jambi* dilaksanakan sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk merespons keterbatasan kapasitas kelembagaan sekolah menengah dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan internal. Kegiatan ini menggunakan pendekatan partisipatif berbasis *Participatory Action Approach* yang melibatkan guru, tenaga kependidikan, dan siswa dalam proses identifikasi masalah, penguatan kapasitas, serta perumusan kebijakan. Data kegiatan diperoleh melalui observasi partisipatif, diskusi kelompok terarah, serta evaluasi reflektif terhadap pemahaman peserta sebelum dan sesudah intervensi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap prinsip kebijakan responsif gender serta kemampuan dalam mengidentifikasi potensi bias gender dalam kebijakan dan praktik sekolah. Luaran utama kegiatan ini adalah tersusunnya draf pedoman kebijakan sekolah responsif gender yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan institusi. Secara keseluruhan, kegiatan ini menunjukkan bahwa pembelajaran kebijakan secara partisipatif dapat memperkuat kapasitas kelembagaan sekolah dalam mendorong pengarusutamaan gender di tingkat pendidikan menengah.

Keywords: Kebijakan Responsif Gender; Pelatihan Partisipatif; Tata Kelola Sekolah; Pengarusutamaan Gender.

Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan manusia yang berperan penting dalam membentuk nilai, sikap, dan perilaku yang berkeadilan. Dalam konteks pendidikan menengah, sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang sosial yang membangun kesadaran kritis terhadap nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender. Oleh karena itu, kebijakan sekolah yang responsif gender menjadi kebutuhan mendesak dalam upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, aman, dan setara bagi seluruh peserta didik (Kementerian & Perempuan, 2024).

Konsep kebijakan responsif gender mengacu pada pendekatan yang memastikan setiap kebijakan, program, dan kegiatan mempertimbangkan kebutuhan, pengalaman, serta dampak yang berbeda antara laki-laki dan perempuan (Women & UNICEF, 2018). Dalam praktiknya, kebijakan yang tidak

sensitif terhadap isu gender sering kali melahirkan ketimpangan struktural di lingkungan sekolah, seperti stereotip peran gender, pembatasan partisipasi siswa perempuan dalam kegiatan tertentu, serta minimnya representasi perempuan dalam posisi kepemimpinan sekolah (Subrahmanian, 2005)

Di Indonesia, pengarusutamaan gender telah menjadi salah satu strategi nasional sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Implementasi kebijakan ini menuntut setiap institusi, termasuk lembaga pendidikan, untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam seluruh proses kebijakan. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa kapasitas lembaga pendidikan, khususnya di tingkat sekolah menengah, masih terbatas dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kebijakan yang responsif gender (Khurun'in & Damayanti, 2023).

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui program *Sekolah Kebijakan: Penyusunan Kebijakan Responsif Gender di Lingkungan SMAN 11 Kota Jambi*. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas analisis, serta keterampilan praktis para pemangku kepentingan sekolah dalam merumuskan kebijakan sekolah yang berperspektif gender. Melalui pendekatan partisipatif, kegiatan ini tidak hanya memberikan transfer pengetahuan teoritis mengenai analisis gender dan perumusan kebijakan, tetapi juga memfasilitasi simulasi penyusunan draft kebijakan sekolah yang lebih inklusif dan adil.

Pemilihan SMAN 11 Kota Jambi sebagai mitra kegiatan didasarkan pada pentingnya membangun *best practice* implementasi kebijakan responsif gender di lingkungan sekolah negeri sebagai model bagi sekolah lain di Provinsi Jambi. Selain itu, kegiatan ini menjadi bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, yang menghubungkan teori-teori kebijakan publik dan gender studies dengan praktik nyata di lapangan. Diharapkan melalui kegiatan ini, akan terbentuk pemahaman yang lebih komprehensif di kalangan tenaga pendidik dan pengelola sekolah tentang pentingnya kebijakan yang sensitif terhadap isu-isu gender, sekaligus memperkuat komitmen institusional dalam menciptakan ruang pendidikan yang berkeadilan bagi semua.

Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di SMAN 11 Kota Jambi sebagai respon atas keterbatasan kapasitas sekolah dalam memahami dan merumuskan kebijakan internal yang responsif gender. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan urgensi pengarusutamaan gender di satuan pendidikan menengah serta kesiapan institusi sekolah untuk terlibat secara aktif dalam proses pendampingan kebijakan. Kegiatan dilaksanakan pada 28 Agustus 2025 dengan melibatkan guru, tenaga kependidikan, dan perwakilan siswa sebagai aktor kebijakan internal sekolah.

Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan partisipatif berbasis *Participatory Action Approach*, yang menempatkan peserta sebagai subjek aktif dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi masalah hingga perumusan solusi kebijakan. Pendekatan ini dipilih karena kebijakan responsif gender tidak dapat dirumuskan secara efektif melalui pendekatan top-down semata, melainkan memerlukan proses pembelajaran kolektif dan reflektif dari para aktor yang terlibat langsung dalam praktik kelembagaan sekolah (Harris-Fry et al., 2016).

Secara operasional, pelaksanaan kegiatan dirancang sebagai suatu proses berjenjang yang menghubungkan pemetaan masalah dengan pemecahan masalah kebijakan. Tahap awal difokuskan pada identifikasi isu dan praktik sekolah yang berpotensi mengandung bias gender melalui observasi lingkungan sekolah dan wawancara eksploratif dengan pihak manajemen sekolah. Proses ini bertujuan untuk membangun pemahaman kontekstual mengenai bentuk ketimpangan gender yang terjadi secara laten dalam kebijakan maupun praktik pendidikan, sebagaimana ditekankan dalam pendekatan *gender mainstreaming* (López et al., 2023).

Tahap selanjutnya diwujudkan melalui kegiatan Sekolah Kebijakan sebagai bentuk intervensi penguatan kapasitas. Pada tahap ini, peserta memperoleh penguatan konseptual mengenai kebijakan responsif gender dan pengarusutamaan gender dalam institusi pendidikan yang dikombinasikan dengan diskusi reflektif berbasis pengalaman. Diskusi kelompok terarah digunakan untuk memfasilitasi peserta dalam mengaitkan konsep dengan realitas kebijakan sekolah yang mereka hadapi, sehingga proses pembelajaran berlangsung secara kontekstual dan aplikatif. Proses ini mencerminkan

mekanisme *policy learning*, di mana perubahan pemahaman aktor kebijakan menjadi prasyarat bagi perubahan praktik kelembagaan (Olsen, 2009) (Meyer & Du, 2025).

Hasil dari proses refleksi dan diskusi tersebut kemudian diarahkan pada simulasi penyusunan draf kebijakan sekolah responsif gender. Peserta secara kolaboratif merumuskan pedoman kebijakan yang berorientasi pada prinsip keadilan dan kesetaraan gender serta sesuai dengan kebutuhan riil sekolah. Proses perumusan kebijakan ini menunjukkan bahwa inovasi kebijakan di tingkat sekolah dapat tumbuh melalui penguatan kapasitas internal dan pembelajaran bersama (*school-based policy innovation*) (Sahlberg & Oldroyd, 2010).

Tahap akhir kegiatan difokuskan pada evaluasi proses dan hasil pengabdian. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan menggunakan instrumen pre-test dan post-test, serta refleksi kualitatif terhadap hasil diskusi dan draf kebijakan yang dihasilkan. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk melihat kecenderungan peningkatan kapasitas peserta dalam memahami dan merumuskan kebijakan responsif gender. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa kegiatan pengabdian tidak berhenti pada transfer pengetahuan, tetapi mendorong perubahan cara pandang dan praktik kebijakan di lingkungan sekolah.

Untuk memperjelas keterkaitan antara tahapan pelaksanaan kegiatan, alur metode pengabdian kepada masyarakat ini disajikan dalam bentuk bagan alur pada Gambar 1, yang menggambarkan hubungan sistematis antara proses identifikasi masalah, intervensi Sekolah Kebijakan, dan perumusan pemecahan masalah kebijakan responsif gender di lingkungan sekolah.



Gambar 1. : Alur Metode Pengabdian Penyusunan Kebijakan Responsif Gender

Keterkaitan antara metode pelaksanaan dan hasil kegiatan dalam pengabdian ini dapat dipahami sebagai satu kesatuan proses pembelajaran kebijakan yang berjenjang. Sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 1, tahap identifikasi masalah gender di sekolah menjadi dasar bagi penyusunan desain intervensi Sekolah Kebijakan. Temuan awal mengenai rendahnya pemahaman peserta terhadap konsep kebijakan responsif gender kemudian dijawab melalui penguatan kapasitas berbasis diskusi partisipatif dan refleksi pengalaman, yang pada tahap hasil tercermin dari meningkatnya kemampuan peserta dalam mengidentifikasi bias gender dalam kebijakan sekolah.

Selanjutnya, tahapan simulasi penyusunan kebijakan yang tergambar dalam alur metode berkontribusi langsung terhadap capaian hasil berupa tersusunnya draf kebijakan sekolah responsif gender. Dengan demikian, hasil kegiatan tidak dipahami sebagai output yang berdiri sendiri, melainkan sebagai konsekuensi logis dari proses intervensi kebijakan yang dirancang secara partisipatif. Integrasi antara metode dan hasil ini menegaskan bahwa kegiatan pengabdian berfungsi sebagai mekanisme *policy learning* yang mendorong perubahan pemahaman sekaligus praktik kelembagaan di lingkungan sekolah.

Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan *Sekolah Kebijakan: Penyusunan Kebijakan Responsif Gender di Lingkungan SMAN 11 Kota Jambi* dilaksanakan pada Kamis, 28 Agustus 2025, dengan melibatkan 32 peserta yang terdiri atas unsur guru, tenaga kependidikan, dan perwakilan siswa. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman civitas sekolah terhadap pentingnya kebijakan yang inklusif dan sensitif terhadap isu gender di lingkungan pendidikan menengah



Gambar 2. : Penyusunan Kebijakan Responsif Gender

Metode yang digunakan meliputi *workshop interaktif*, *focus group discussion (FGD)*, dan *simulasi penyusunan kebijakan sekolah responsif gender*. Data diperoleh dari observasi lapangan, hasil kuesioner pra dan pasca kegiatan, serta dokumen kebijakan internal sekolah.

2. Temuan Utama Kegiatan

Hasil kegiatan menunjukkan tiga temuan ilmiah utama:

- a. Rendahnya pemahaman awal tentang konsep kebijakan responsif gender.

Berdasarkan hasil kuesioner pra-kegiatan, sebanyak 71,8% peserta belum memahami perbedaan antara kebijakan netral gender dan kebijakan responsif gender. Sebagian besar masih menganggap kebijakan yang “tidak membedakan laki-laki dan perempuan” sudah cukup adil, tanpa memahami

bahwa pendekatan tersebut justru dapat mengabaikan kebutuhan spesifik masing-masing gender.

Secara ilmiah, hal ini sejalan dengan teori *gender mainstreaming* (Programme, 1997) yang menekankan bahwa keadilan substantif tidak dapat dicapai hanya dengan memperlakukan semua pihak secara sama, melainkan melalui kebijakan yang memperhitungkan kondisi dan kebutuhan berbeda antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, ketidaktahuan peserta mencerminkan belum terinternalisasinya konsep *equality of outcome* di lingkungan pendidikan menengah.

- b. Meningkatnya kapasitas analisis gender setelah intervensi pelatihan. Setelah pelaksanaan *workshop* dan *FGD*, sebanyak 87,5% peserta menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar analisis gender, khususnya dalam menggunakan alat analisis *Gender Analysis Pathway (GAP)* dan *Gender Budget Statement (GBS)*. Peserta mulai mampu mengidentifikasi potensi ketimpangan gender dalam kebijakan sekolah, misalnya dalam pembagian peran kegiatan ekstrakurikuler, sistem disiplin siswa, dan mekanisme perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender.

Di mana pembelajaran orang dewasa efektif ketika peserta diberi ruang untuk berbagi pengalaman dan langsung menerapkan konsep dalam konteks nyata. Hal ini terbukti dalam dinamika diskusi kelompok yang menekankan pada *case-based learning*, memungkinkan guru dan siswa untuk merefleksikan kebijakan sekolah yang selama ini mereka jalankan.

- c. Terbentuknya draf awal kebijakan sekolah responsif gender. Salah satu capaian nyata dari kegiatan ini adalah tersusunnya *draft* “Pedoman Internal Kebijakan Responsif Gender SMAN 11 Kota Jambi” yang memuat tiga pilar utama: (1) Pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender di sekolah; (2) Pengarusutamaan gender dalam kegiatan belajar-mengajar dan organisasi siswa; serta (3) Mekanisme pemantauan dan evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan tersebut.

Temuan ini mendukung hasil penelitian (Iswahyudi et al., 2023) yang menyebutkan bahwa *school-based policy innovation* menjadi strategi efektif dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang berkeadilan

gender. Namun, berbeda dengan temuan-temuan sebelumnya yang berfokus pada sekolah kejuruan, kegiatan pengabdian ini memperluas penerapan konsep tersebut di tingkat sekolah menengah umum.

Pembahasan

Secara konseptual, kegiatan Sekolah Kebijakan menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif mampu menjadi instrumen efektif dalam menjembatani kesenjangan antara kebijakan normatif dan praktik kelembagaan di tingkat sekolah. Temuan awal mengenai rendahnya pemahaman peserta terhadap konsep kebijakan responsif gender mengindikasikan bahwa kebijakan sekolah selama ini cenderung bersifat netral gender, tetapi belum menyentuh aspek keadilan substantif. Kondisi ini sejalan dengan pandangan (Subrahmanian, 2005) yang menegaskan bahwa kebijakan pendidikan sering kali gagal merespons kebutuhan gender secara spesifik ketika hanya berorientasi pada kesetaraan formal.

Peningkatan kapasitas analisis gender peserta setelah intervensi pelatihan memperlihatkan terjadinya proses pembelajaran kebijakan (*policy learning*) di tingkat aktor kelembagaan sekolah. Melalui diskusi reflektif dan simulasi penyusunan kebijakan, guru dan siswa tidak hanya memahami konsep pengarusutamaan gender secara teoritis, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan konteks kebijakan sekolah yang mereka hadapi dalam praktik sehari-hari. Proses ini mendukung pandangan (Olsen, 2009) bahwa perubahan kebijakan institusional umumnya diawali oleh perubahan cara pandang, norma, dan pengetahuan aktor kebijakan internal, bukan semata-mata oleh instruksi struktural dari tingkat atas.

Temuan berupa tersusunnya draf kebijakan sekolah responsif gender menunjukkan bahwa inovasi kebijakan di tingkat satuan pendidikan dapat tumbuh melalui penguatan kapasitas internal. Dalam konteks ini, Sekolah Kebijakan berfungsi sebagai ruang pembelajaran sekaligus ruang eksperimentasi kebijakan bagi sekolah. Hal ini memperkuat temuan (Iswahyudi et al., 2023) yang menyatakan bahwa *school-based policy innovation* merupakan strategi efektif dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang adaptif dan berkeadilan, karena kebijakan dirumuskan berdasarkan kebutuhan riil dan partisipasi aktor lokal.

Lebih jauh, hasil kegiatan ini memperlihatkan bahwa pengarusutamaan gender di sekolah tidak dapat dipahami sebagai agenda administratif semata,

melainkan sebagai proses sosial dan kelembagaan yang memerlukan keterlibatan aktif seluruh warga sekolah. Keberhasilan awal program ini tidak terlepas dari dukungan pimpinan sekolah serta keterlibatan lintas aktor, termasuk guru dan siswa. Hal ini sejalan dengan temuan (Barroroh, 2020) yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan responsif gender sangat ditentukan oleh komitmen kepemimpinan, kapasitas sumber daya manusia, dan ketersediaan pedoman operasional yang jelas.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa kegiatan pengabdian tidak hanya menghasilkan luaran berupa dokumen kebijakan, tetapi juga mendorong transformasi pengetahuan, sikap, dan praktik kebijakan di lingkungan sekolah. Model Sekolah Kebijakan yang diterapkan dalam kegiatan ini memiliki potensi untuk direplikasi pada satuan pendidikan lain, dengan penyesuaian konteks lokal, sebagai bagian dari upaya sistematis memperkuat pengarusutamaan gender di sektor pendidikan.

Penutup

Kegiatan *Sekolah Kebijakan: Penyusunan Kebijakan Responsif Gender di Lingkungan SMAN 11 Kota Jambi* telah berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kapasitas dan kesadaran warga sekolah dalam memahami serta merancang kebijakan yang berperspektif gender. Secara umum, terdapat tiga kesimpulan utama yang dapat ditarik dari hasil kegiatan:

1. Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran Gender.

Peserta kegiatan, yang terdiri dari guru, tenaga kependidikan, dan siswa, mengalami peningkatan signifikan dalam memahami konsep *gender mainstreaming* serta urgensi kebijakan responsif gender. Perubahan ini menunjukkan efektivitas pendekatan partisipatif dan kontekstual dalam proses pembelajaran kebijakan.

2. Terbangunnya Kapasitas Analisis dan Penyusunan Kebijakan.

Melalui pelatihan berbasis *case-based learning* dan *focus group discussion (FGD)*, peserta mampu mengidentifikasi potensi ketimpangan gender di lingkungan sekolah serta menyusun rekomendasi kebijakan berbasis data dan kebutuhan nyata. Pendekatan ini memperkuat kemampuan reflektif dan analitis dalam proses perumusan kebijakan tingkat sekolah.

3. Lahirnya Draf Awal Kebijakan Responsif Gender Sekolah.

Produk akhir kegiatan berupa draft “Pedoman Internal Kebijakan Responsif Gender SMAN 11 Kota Jambi” menjadi bentuk konkret hasil kolaborasi antara tim pengabdian dan pihak sekolah. Dokumen ini tidak hanya memuat prinsip-prinsip umum keadilan gender, tetapi juga rencana aksi dan mekanisme evaluasi kebijakan yang dapat diterapkan secara berkelanjutan.

Implikasi dan Rekomendasi Hasil kegiatan memberikan beberapa implikasi strategis:

- a. Implikasi kebijakan: perlu adanya dukungan dari Dinas Pendidikan Kota Jambi untuk mengadopsi *model Sekolah Kebijakan Responsif Gender* sebagai bagian dari program penguatan karakter dan tata kelola sekolah.
- b. Implikasi akademik: hasil kegiatan dapat menjadi bahan ajar dan studi kasus dalam matakuliah *Kebijakan Publik dan Gender dan Politik* di lingkungan Program Studi Ilmu Politik Universitas Jambi.
- c. Implikasi praktis: perlunya pendampingan lanjutan selama enam bulan pasca kegiatan untuk memastikan implementasi dan monitoring kebijakan berjalan sesuai pedoman.

Temuan-temuan tersebut mengindikasikan bahwa intervensi berbasis *policy learning* dapat menjadi model efektif dalam memperkuat budaya kebijakan yang inklusif dan adil di satuan pendidikan. Selain memberikan kontribusi praktis bagi sekolah, kegiatan ini juga memberikan nilai akademik berupa penerapan teori *gender mainstreaming* dan *institutional change* dalam konteks pendidikan menengah.

Acknowledgements

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Universitas Jambi melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) atas dukungan dan pendanaan yang diberikan, sehingga program pengabdian masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

Daftar Pustaka

Bappenas. (2020). *Panduan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

- Barroroh, D. W. I. T. (2020). Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Oleh Pemerintah Kota Batu
- Budiharsana, M. (2019). Gender mainstreaming in education policy in Indonesia: Challenges and opportunities. Jakarta: UN Women Indonesia.
- Connell, R. W. (2009). Gender in World Perspective (2nd ed.). Cambridge: Polity Press.
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). Designing and Conducting Mixed Methods Research (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Dewi, N. K., & Lestari, S. (2021). Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di sekolah menengah atas. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan*, 6(2), 145–156.
- Ferree, M. M., & Tripp, A. M. (Eds.). (2006). Global Feminism: Transnational Women's Activism, Organizing, and Human Rights. New York: New York University Press.
- Handayani, T., & Sugiarti. (2020). Konsep dan Strategi Pengarusutamaan Gender dalam Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Htun, M., & Weldon, S. L. (2010). When do governments promote women's rights? A framework for the comparative analysis of sex equality policy. *Perspectives on Politics*, 8(1), 207–216. <https://doi.org/10.1017/S1537592709992787>
- Iswahyudi, M. S., Irianto, I., Salong, A., Nurhasanah, N., Leuwol, F. S., Januaripin, M., & Harefa, E. (2023). Kebijakan dan inovasi pendidikan: Arah pendidikan di masa depan. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kabeer, N. (2015). Gender, poverty, and inequality: A brief history of feminist contributions in the field of international development. *Gender & Development*, 23(2), 189–205. <https://doi.org/10.1080/13552074.2015.1062300>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2021). Panduan Sekolah Ramah Gender. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Kementerian, S., & Perempuan, P. (2024). Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024.

- Khurun'in, I., & Damayanti, R. (2023). *Perempuan & kebijakan publik*. Universitas Brawijaya Press.
- Moser, C. (1993). *Gender Planning and Development: Theory, Practice, and Training*. London: Routledge.
- Olsen, J. P. (2009). Change and continuity: an institutional approach to institutions of democratic government. *European Political Science Review*, 1(1), 3–32.
- Programme, D. (1997). *DEVELOPMENT REPORT 1997*.
- Rahmawati, D., & Fitriani, E. (2022). Pelatihan penyusunan kebijakan responsif gender bagi tenaga pendidik di sekolah menengah. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sosial Humaniora*, 4(1), 12–20.
- Squires, J. (2007). *The New Politics of Gender Equality*. London: Palgrave Macmillan.
- Subrahmanian, R. (2005). Gender equality in education: Definitions and measurements. *International Journal of Educational Development*, 25(4), 395–407
- United Nations Development Programme (UNDP). (2020). *Gender Equality Strategy 2020–2025*. New York: UNDP.
- Women, U. N., & UNICEF. (2018). *International technical guidance on sexuality education: an evidence-informed approach*. UNESCO Publishing.